



Polda Metro Jaya Dan Kodam Jaya Siap Amankan TPS Yang Rawan Pemilu 2019

BeritaNasional.ID Jakarta – Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya siap mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk kategori rawan pada pemilihan umum (Pemilu) 2019.

“Kita sudah membagi habis anggota-anggota kita untuk melakukan pengamanan di tempat tersebut,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono kepada wartawan, Senin (15/4/2019).

Gatot menjelaskan, berdasarkan tingkat pengamanannya, Polda Metro Jaya membagi TPS berdasarkan tingkat kerawanan, yakni TPS aman, TPS rawan, TPS sangat rawan, dan TPS khusus.

TPS yang aman merupakan TPS yang diperkirakan minim adanya potensi kerawanan konflik dan tindak kejahatan.

“Sebagai contoh kalau di daerah tersebut di dominasi oleh satu

pasangan calon dan tidak ada konflik sebelumnya ataupun potensi gangguan keamanan, kita anggap ini daerah yang aman,” ujar Gatot.

Gatot mengatakan pada TPS dengan kategori aman, akan ditempatkan satu personel Polri dan TNI, serta 16 anggota perlindungan masyarakat (linmas) untuk mengamankan delapan TPS.

Kemudian TPS kategori rawan adalah TPS yang memiliki potensi konflik antar-pendukung baik calon anggota legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden.

“Kemungkinan antara-pasangan satu dan yang lain berimbang (pendukungnya) atau ada potensi-potensi konflik tapi tidak terlalu rawan,” ucap Gatot.

Pada TPS rawan akan ditempatkan satu anggota Polri dan TNI, serta delapan orang linmas untuk mengawasi empat TPS.

“Dari semua itu, kita tidak memiliki yang namanya TPS yang sangat rawan. Kita memiliki TPS (kategori) yang aman dan rawan. Ada TPS khusus yaitu seperti di rumah sakit, di bandara dan lain sebagainya,” tutur Gatot.

Lebih lanjut Gatot mengatakan apabila perkembangan di lapangan terjadi potensi peningkatan kerawanan, seperti meningkatnya dukungan terhadap pasangan tertentu, atau potensi terjadinya konflik sosial, maka baik TNI dan Polri akan mempertebal kekuatan pasukan.

“Kita akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk masyarakat menjadi aman, nyaman untuk datang ke TPS dan kita jamin itu. Jangan takut dan jangan ragu untuk datang ke TPS untuk memilih sesuai dengan kehendak mereka masing-masing,” ucap Gatot, menegaskan.

Gatot menambahkan TNI dan Polri juga menjamin keamanan dan kenyamanan kelompok minoritas saat merayakan pesta demokrasi

lima tahunan tersebut.

“Soal masyarakat minoritas kita akan mengamankan, siapa saja tidak kita beda-beda kan, kita akan berikan pengamanan,” tegas jenderal polisi bintang dua itu.

Sementara itu Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa saat ini wilayah Jakarta dan sekitarnya berada dalam kondisi yang aman dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan, jelang pemilu 17 April 2019.

“Kita akan deteksi dan akan kita cegah sedini mungkin (ancaman dan gangguan) sehingga pada kegiatan pemilu demokrasi, pesta demokrasi tanggal 17 April dan pasca-nya, kita berharap semuanya dapat berlangsung dengan aman dan damai,” ujar Eko.
(dki1/bn)



10 TPS Di Bandara Soekarno-Hatta Dijaga Ratusan Polisi

BeritaNasional.ID Jakarta – Polres Bandara Soekarno-Hatta akan menerjunkan 727 personil pada Pemilu 17 April 2019. Ratusan petugas kepolisian nantinya akan disiagakan di 10 titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

“Karena ini adalah objek vital. Kami menempatkan dua personel ditambah petugas dan Linmas yang dilibatkan di setiap TPS. Kami juga menyiapkan personel diluar TPS agar proses penerbangan juga dapat berjalan lancar,” ujar Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Siwi Erma Andriani, Jumat (12/4/2019).

Siwi mengatakan, sebanyak 407 personel Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan 320 personel dari Polda Metro Jaya akan menjaga ketat titik-titik TPS yang tersebar di Bandara Soekarno-Hatta. Angka tersebut belum ditambah personel dari TNI.

Sistem pengamanan yang dilakukan yakni, pengamanan melekat disetiap TPS yang tersebar serta, patroli rutin baik itu saat pencoblosan maupun sebelum dan sesudah.

“Tentu pengamanan melekat kita lakukan, demi kelancaran proses pemilihan yang dimana, tidak mengganggu proses penerbangan karena kita ketahui, TPS itu disediakan juga di terminal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Data KPU Kota Tangerang, Ahmad Subhan, mengatakan 10 TPS tersebut akan hadir di tiap terminal di Bandara Soekarno-Hatta. “Untuk titik-titik pastinya kita belum terkonfirmasi, tapi untuk lokasi sudah pasti,” ungkapnya.

Dari data yang didapatkan, ke-10 TPS tersebut berada di Garuda Maintenance Facility (GMF) sebanyak lima TPS, dua TPS di Terminal 1, lalu satu TPS di Terminal 2, dan satu TPS di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Satu TPS berada di area kargo Bandara Soekarno-Hatta.

“Untuk KPPS-nya ada 90 orang yang tersebar di 10 TPS Bandara Soekarno-Hatta,” kata Subhan. **(dki1/bn)**



Gubernur DKI Jakarta Bentuk Satgas Anti Kekerasan Di Sekolah

BeritaNasional.ID Jakarta – Pemprov DKI Jakarta segera membentuk satuan tugas khusus mencegah adanya kekerasan di sekolah. Satgas tersebut dibentuk di tiap sekolah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, satuan tugas terdiri dari unsur siswa, orang tua, tokoh pendidikan atau masyarakat, guru, dan pemerintah.

“Gugus itu berperan mendeteksi kekerasan di kalangan anak-anak sebelum memuncak menjadi peristiwa yang besar. Sehingga masalah kekerasan di sekolah itu diselesaikan sebagai masalah pendidikan,” kata Anies, Kamis (11/4/2019).

Anies mengatakan, pihaknya tengah menyusun aturan tentang

pembentukan satuan tugas tersebut. “Pergub tentang pembentukan gugus pencegahan kekerasan di sekolah sedang disusun,” katanya.

Anies menjelaskan, saat menjadi menteri pendidikan, pihaknya sudah membuat aturan tersebut. “Sebetulnya sudah ada peraturan menteri yang terkait dengan itu. Kalau tidak salah Peraturan Menteri Nomor 82 tahun 2015,” katanya.

Peraturan menteri tersebut mengatur bahwa setiap sekolah harus memiliki gugus pencegahan kekerasan. Gugus pencegahan kekerasan ini juga harus dimiliki setiap kota/kabupaten.

“Jadi setiap kota harus punya, ada peraturannya. Kemudian di tingkat sekolah juga ada. Anda bisa lihat, saya yang tanda tangan kok saya yang bikin aturannya,” kata Anies

Dengan adanya gugus itu, dapat mencegah masalah kekerasan anak-anak diabaikan atau justru dibawa ke ranah kepolisian sebagai tindak pidana.

Gugus pencegahan kekerasan di tingkat kota melakukan kontrol ke sekolah-sekolah terkait kekerasan yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi.

“Di tingkat kota, mereka harus mengontrol tiap enam bulan sekali semua sekolah, sehingga bisa dicegah sebelum ada peristiwa” pungkas Anies. (dkil/bn)



Bamsoet: Pengguna Aplikasi DPR Now! Terus Meningkatkan Signifikan

BeritaNasional.ID Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi perkembangan aplikasi DPR Now! yang terus meningkat signifikan. Sampai dengan 31 Maret 2019, jumlah pengunduh aplikasi DPR Now! mencapai 9.435 user. Sedangkan member yang melengkapi data diri menembus 1.115 member dengan rincian perempuan 900 akun (80,77 persen) dan laki-laki 215 akun (19,23 persen).

“Jika dirinci lebih lanjut, pada 28 Februari 2018 terdapat

8.861 member. Meningkat menjadi 9.036 member pada 10 Maret 2019. Naik lagi menjadi 9.273 member pada 17 Maret 2019. Pada 24 Maret 2019 menjadi 9.362 member dan mencapai 9.435 member di akhir 31 Maret 2019,” ujar Bamsuet di Jakarta, Rabu (03/04/19).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menghimbau kepada masyarakat yang ingin menjadi member DPR Now! agar dalam proses registrasi melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan. Sebagai anggota yang terdaftar, akan memudahkan pengecekan maupun tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan.

“Sama halnya seperti platform media sosial seperti instagram, facebook, maupun twitter, pendaftar aplikasi DPR Now! juga diminta mengisi berbagai kelengkapan data diri. Hal ini agar memudahkan DPR RI dalam menindaklanjuti aduan yang disampaikan. Sehingga, bisa terjalin komunikasi dua arah antara DPR RI dengan masyarakat dan juga sebaliknya,” tutur Bamsuet.

Lebih jauh Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini merinci, dari berbagai aduan yang masuk ke aplikasi DPR Now! pada Maret 2019, paling banyak ditujukan kepada Komisi X DPR RI sebanyak 16 aduan. Disusul Komisi I, II dan III DPR RI dengan masing-masing 4 aduan.

“Besarnya aduan yang masuk ke Komisi X DPR RI yang melingkupi bidang pendidikan, olahraga dan sejarah, lantaran masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan pondasi utama bangsa. Keluhan terbanyak yang datang berkisar kepada kualitas perpustakaan,” papar Bamsuet.

Dari segi legislasi, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, DPR RI sudah mendukung peningkatan kualitas perpustakaan. Setidaknya ada empat undang-undang terkait perpustakaan, naskah kuno, pengembangan perbukuan dan penyelamatan karya intelektual bangsa. Semisal, UU Nomor

43/2007 tentang Perpustakaan, UU Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, UU Nomor 3/2017 Sistem Perbukuan dan UU Nomor 13/2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

“Guna memastikan keberadaan UU tersebut dijalankan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah, DPR RI melalui fungsi pengawasan melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah guna melihat secara langsung kondisi perpustakaan. Sekaligus mencari tahu apa penyebab penghambat yang terjadi di lapangan. Dengan demikian bisa menjadi input berharga dalam mencari solusi terbaik,” terang Bamsuet.

Melalui aplikasi DPR Now! Dewan Pakar KAHMI ini menuturkan berbagai program dan fungsi yang telah dijalankan oleh DPR RI bisa disosialisasikan dan diinformasikan kepada publik. Pun sebaliknya, publik bisa melihat setiap aktifitas dan denyut nadi kegiatan para wakil rakyatnya di DPR RI. Bahkan berbagai sidang maupun kegiatan kedewanan bisa dilihat secara real time di DPR Now!.

“Bagi yang belum mengunduh aplikasi DPR Now!, bisa segera mengunduh melalui smartphone masing-masing. Dengan mengunduh dan berpartisipasi dalam DPR Now! masyarakat sudah turut aktif dalam menumbuhkembangkan demokrasi di Indonesia. Sekaligus memastikan kedaulatan rakyat betul-betul dijalankan oleh para wakilnya di DPR RI,” pungkas Bamsuet. (**Parasian Tambunan**)



Relawan Merahhati Buka Pendaftaran Pemantau Dan Pengawas Di TPS DKI Jakarta

BeritaNasional.IDJakarta – Salah satu relawan pendukung pasangan Capres Joko Widodo dan Cawapres Maruf Amin yakni Relawan MerahHati membuka pendaftaran bagi warga DKI Jakarta untuk menjadi relawan Pengawal suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saat ini kami membutuhkan ribuan relawan di DKI Jakarta untuk mengawal suara Jokowi-Maruf mulai dari TPS hingga Kecamatan,” kata Koordinator Nasional Relawan Merah Hati, Hendri Kurniawan, Jumat (22/3/2019).

Dia menjelaskan pembukaan relawan pemantau TPS ini hanya dilakukan khusus di Jakarta. Dia juga menuturkan pihaknya tidak menyiapkan pengganti transport bagi relawan yang bergabung.

“Namanya kita relawan. Kami hanya menyiapkan surat tugas, Baju dan buku pencatat,” tegasnya.

Lebih lanjut dia juga menuturkan kalau saat ini sudah ada ratusan pendaftar pengawal suara Jokowi di TPS untuk wilayah Jakarta. Sudah ada 89 di Jaktim, 78 di Jakbar, 83 di Jakut, 27 Jaksel dan 61 di Jakpus.

“Kami masih terus membuka relawan pemantau. Untuk mendaftar cukup buka web kami di Merahhati.id,” tutupnya. (daff/dki)



Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran Di Pulogadung Jaktim

BeritaNasional.ID Jakarta – Subdit 3 Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tindakan kekerasan secara bersama-sama di muka umum dan menggunakan senjata tajam tanpa izin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, peristiwa tawuran yang terjadi pada hari minggu 17 Maret di Terminal Pulogadung Jakarta Timur, berawal dari alasan dendam. Dimana sebelumnya kelompok 3 serangkai pernah

terlibat perkelahian dengan Anak-anak Warjenk.

“Dalam perkelahian pertama 3 Serangkai kalah, timbul balas dendam dari kelompok 3 serangkai untuk menyerang kembali kelompok Warjenk dengan menggunakan senjata tajam,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (20/3/2019).

Dalam aksi balas dendam kelompok 3 Serangkai menyebabkan 4 orang dari kelompok Warjeng mengalami luka parah terkena sabetan senjata tajam. Ahmad Ilyas, mengalami luka bacok pada bagian tangan yang hampir putus, Aji Apriyansyah, mengalami luka bacok di kepala samping kanan, Fadel Afgan, mengalami luka bacok pada bagian punggung, dada dan muka.

“Muhammad Hafidz, mengalami luka pada bagian pelipis keempat korban masih di rawat di rumah sakit Persahabatan dan RS Colombia,” jelasnya.

Argo melanjutkan dalam kejadian itu pihaknya berhasil mengamankan 13 orang dari kelompok 3 serangkai yang terlibat langsung dalam perkelahian. KV (16), MHR (17), SSR (17), LN (18), MFD (24), DMS (19), FZ (21), AWL (20), BBG (21) LTF (20), FJR (18), DN (18), AVN (18).

“Setelah di lakukan penyelidikan 3 anak-anak, 10 dewasa menjadi tersangka, satu di periksa semua ada 13, peran menyerang menggunakan batu dan membawa samurai dan membacok juga,” beber Argo.

Atas perbuatannya 13 tersebut di kenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 2 ayat (1) tentang undang-undang kepemilikan senjata tajam dengan hukuman penjara setingginya 10 tahun penjara. **(daff/dki)**



Polisi Tangkap Lima Pendemo Bajak Mobil Tangki Pertamina

BeritaNasional.ID Jakarta – Polisi tetapkan lima tersangka atas kasus pembajakan dua mobil truk tangki PT. Pertamina. Adapun lima tersangka tersebut, yakni N, TK, WH, AM dan M.

“Tersangka sementara ada lima. Saat ini masih ada yang dalam pengejaran, kita belum mengeluarkan DPO,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/3/2019).

Sementara itu, hingga kini polisi masih memeriksa lima orang lainnya terkait dengan kasus itu. Namun ia mengaku belum dapat memastikan status dan peran dari kelima orang tersebut.

“Saat ini ada lima orang (lainnya) sedang kita periksa. Jadi nanti kita mengetahui peran dia, apakah dia ikut melakukan pidana ini. Saat ini (statusnya) belum kita tetapkan. Nanti kalau sudah selesai baru kita ketahui peran dari mereka,”

imbuhnya.

Ia menjelaskan, kedua mobil tanki tersebut dibajak di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Yos Sudarso dan Jalan Artha Gading, Jakarta Utara. Kedua mobil tangki tersebut dibajak oleh massa sesuai mengisi bahan bakar di Plumpang, Jakarta Utara dan hendak menuju ke tol Merak Tangerang dan Tol Jagorawi.

Kelima tersangka terancam maksimal hukuman 20 tahun penjara dengan Pasal 365, 368, 170 dan 335.

Sebelumnya diketahui, sejumlah massa 'Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki' membajak dua mobil tangki milik PT. Pertamina. Dua mobil tangki yang dihadang dan dilarikan itu berukuran 32 Kilo Liter (KL). Dalam dua mobil tangki BBM itu berisi biosolar dalam kondisi penuh.

"Kami telah menerima laporan adanya penghadangan dan perampasan mobil tangki yang sedang mengangkut biosolar. Kami sudah melapor pada aparat kepolisian," kata Humas PT Pertamina Patra Niaga Ayulia, Senin (18/3/2019). **(dki1/bn)**



Polisi Tangkap DP0 Pelaku Curas Di Jakarta Barat, Satu Orang Tewas Didor

BeritaNasional.ID Jakarta – Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menangkap 2 pelaku Daftar pencarian Orang (DP0) kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Daan Mogot Kebon Jeruk Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Dalam aksi pembegalan itu kelompok begal menewaskan korban bernama Ivan Surya Saputra pada senin lalu.

“Kedua pelaku yang berhasil diamankan Ai als Kl (20 th) dan Mm als Tompel (27 th) ditangkap di dua tempat berbeda diantaranya pelaku Ai als Kl ditangkap ditempat persembunyiannya di di

Jl. Gunung Galunggung 12 Blok E13 Gg. Satro Rt.05 Rw.15, Kel Cengkareng, Jakarta Barat pada 14 Maret 2019 sedang kan Mm als Tompel (MD), berhasil kami amankan didaerah Cni kembangan,” kata Kapolres Jakbar, Kombes Pol Hengki Haryadi, saat dikonfirmasi senin (18/3)

Hengki menjelaskan satu pelaku Mm als Tompel (27 th) sempat melawan petugas menggunakan Celurit yang disimpan Pelaku dibalik tas, sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku.

“Naas saat dibawa ke rumah sakit nyawa pelaku tidak dapat tertolong,” tambah Hengki

Dilokasi yang sama Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edi Suranta Sitepui berhasil mengamankan ke Dua Pelaku DPO Ai als Kl dan Mm als Tompel merupakan Otak pelaku geng Gabores yang menewaskan korbannya Ivan Surya Saputra di jalan daan Mogot jakarta Barat pada senin yang lalu

“Adapun Peran pelaku Mm als Tompel (MD) merupakan Otak pelaku dari ke 4 pelaku anggota geng motor Gabores yang berhasil kami amankan, dimana Mm als Tompel merupakan otak pembunuhan terhadap Korban Ivan Surya Saputra dijalan daan mogot, dimana dirinya merupakan orang yang membentuk karakter dari ke 4 pelaku Geng Gabores Yang kami amankan sehingga melakukan tindakan keji terhadap korban,” tutup edi. **(daff/dki)**



Penjarakan Investor Asing, PN Jakarta Utara Rusak Iklim Investasi

BeritaNasional.ID Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) memvonis bersalah warga negara Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia sejak 2006, Yu Jing, dalam kasus penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Pengusaha tambang itu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 374 juncto 64 KUHP. Kuasa hukum Yu Jing seketika banding menyikapi vonis majelis hakim pada 6 Maret 2019 itu.

Menurut salah satu penasihat hukum Yu Jing, Anton Indradi, putusan hakim berbahaya, karena merusak iklim investasi di

Indonesia.

“Keputusan bersalah majelis hakim menakutkan bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Sebab merusak kepastian hukum bagi investor di negara ini,” ujar Anton di kantor pengacara Yan Apul dan Rekan, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Apalagi, imbuh dia, putusan hakim dinilai tak sesuai koridor hukum.

“Padahal di sisi lain pemerintahan Jokowi menggenjot investasi dengan mempermudah perizinan dan kepastian hukum. Nah dalam kasus ini justru investor asing malah mendapatkan sebaliknya, jangan dizalimi klien kami,” tutur Anton.

Persoalan sendiri bermula dari laporan yang dibuat pihak Agritrade Resources Limited (ARL) terhadap Yu Jing. Perusahaan asal Singapura itu mempolisikan Yu Jing ke Bareskrim Polri dengan sangkaan penggelapan dan penyalahgunaan jabatan sebagai Direktur Utama PT Merge Energy Sources Development (MESD), anak usaha

Merge Mining Holding Limited (MMHL), perusahaan Yu Jing yang sahamnya sebanyak 51 persen disepakati dibeli ARL senilai USD 153 juta. Sebab, uang senilai USD 10,3 juta yang merupakan sebagian pembayaran pembelian saham MMHL yang selanjutnya diperuntukkan MESD, dinilai disalahgunakan bukan untuk perusahaan melainkan kepentingan pribadi.

“Dituduh menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Semua pembuktiannya berdasarkan asumsi. Bahkan pihak penerima uang yang ditransfer tidak pernah diperiksa,” jelas dia.

Jaksa, kata Anton, tidak pernah membuktikan dakwaan jika uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Yu Jing. Jaksa justru menyerahkan pembuktian kepada pihak Yu Jing. Adapun pria uzur yang tengah sakit-sakitan itu menjelaskan, jika uang dipakai untuk kepentingan operasional perusahaan seperti

membayar hutang, gaji dan rekrutmen tenaga kerja.

“Dari USD 10,3 juta, pihak ARL hanya memiliki bukti uang USD 1,84 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Itupun mereka tidak bisa membuktikan. Mereka hanya meminta pembuktian terbalik, Yu Jing yang menjelaskan. Sementara kondisi klien kami telah ditahan, seluruh dokumen dan kantor telah dikuasai oleh mereka, lalu bagaimana membuktikannya? Mereka saja enggak bisa membuktikan,” papar Anton.

Penasihat hukum Yu Jing lainnya, Teguh Samudera, mengatakan jaksa seharusnya membuktikan semua dakwaannya, bukan malah terdakwa. Hal ini merupakan perintah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

“Baik putusan maupun pembuktian dakwaan, tidak sesuai ketentuan hukum beracara. Jika memang Yu Jing dianggap melanggar perjanjian terkait penggunaan uang, harusnya ditarik ke ranah perdata, ini malah dipotong, dipaksa ditarik ke ranah pidana,” jelas dia.

Anton mengungkapkan kasus ini telah dipantau pihak Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Karenanya ia berharap di tingkat banding nanti, hakim menangani perkara secara profesional dan memenuhi rasa keadilan.

“Klien kami sampai bilang ketika pembelaan ‘Untuk apa saya menggelapkan uang saya sendiri? Itu kan uang saya hasil jual saham MMHL’,” ucapnya.

Sebagai direktur utama, Yu Jing sendiri dipandang wajar mengeluarkan uang perusahaan untuk operasional. Apabila dipermasalahkan, ada forum pertanggungjawaban yang sesuai prosedur.

“Kalau memang ingin pertanggungjawaban, harusnya di forum atau mekanisme yang sesuai seperti RUPS (rapat umum pemegang saham) atau ketika laporan tahunan. Bukan baru beberapa bulan memiliki saham, karena curiga langsung membuat laporan.

Padahal ARL baru memenuhi kewajibannya sebagian kecil dalam akuisisi saham MMHL, dari 153 juta mereka baru bayar USD 12 juta, dan karena kasus ini mereka jadi menguasai seluruh perusahaan dan anak usaha termasuk PT MMI, PT MCM. Ini kan luar biasa,” tandas Anton. (dki1/bn)



Pemprov DKI Lepas Saham Bir, Fraksi PPP: Sesuai Aspirasi Umat

BeritaNasional.ID Jakarta – Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta menyatakan mendukung penuh keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk melepas saham di perusahaan bir, PT Delta Djakarta.

Anggota Fraksi PPP DPRD DKI Rendhika D Harsono mengatakan pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan bir tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat.

“Sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, apalagi alasannya tidak lepas,” kata Rendhika di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Fraksi PPP di DPR RI, kata Rendhika, sejak lima tahun belakangan ini selalu memperjuangkan RUU Anti Miras, namun

selalu gagal karena tidak didukung oleh beberapa fraksi lainnya.

“Yang saya katakan fakta loh, bukan hoax. PPP terus berjuang menggolkan RUU Anti Miras, tapi diganjal oleh fraksi lainnya di Senayan,” ujarnya.

Dia pribadi menilai keputusan Gubernur Anies Baswedan melepas saham di PT Delta Djakarta sudah sesuai dengan janjinya, dan didukung oleh warga Jakarta.

“Tidak perlu berpolemik dalam persoalan ini. Keputusan pak Gubernur Anies sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ucap Rendhika.

Dia memastikan bersama seluruh anggota Fraksi PPP DPRD DKI akan mengawal dan mendukung keputusan Anies tersebut.

Mengenai adanya kekhawatiran dilepasnya kepemilikan saham di PT Delta Djakarta akan mempengaruhi penerimaan atau keuangan Pemprov DKI, anggota Komisi B DPRD DKI ini menegaskan itu opini yang mengada-ada saja.

“Penerimaan Pemprov DKI tidak hanya dari deviden perusahaan BUMD. Banyak cara yang lebih bermartabat untuk mendapatkan uang. Kami juga di Badan Anggaran, tahu benar dari mana saja dan apa yang bisa kita perbuat untuk memberikan kontribusi bagi Pemprov DKI,” tukasnya.

Namun begitu, Rendhika mengingatkan pelepasan saha, di PT Delta Jakarta harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada yang dirugikan. **(daff/dki)**